

BAB I

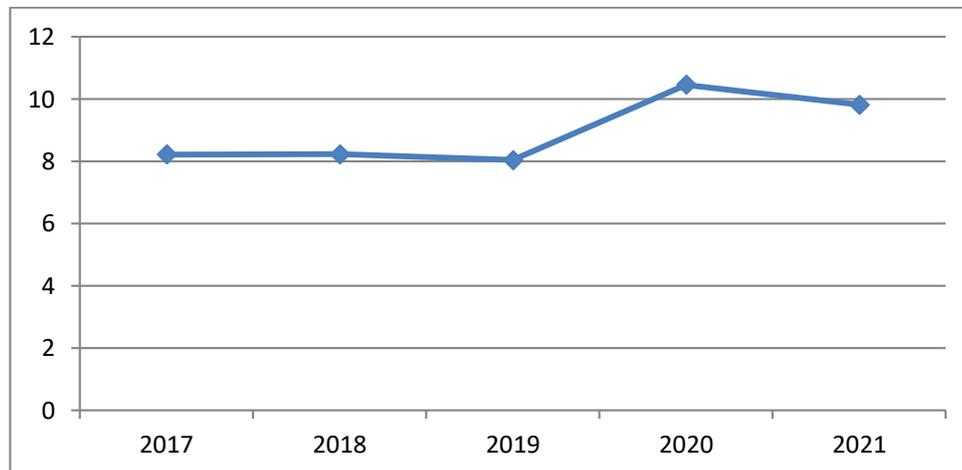
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Di Negara maju maupun Negara berkembang pengangguran menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi. Masalah pengangguran ini bisa menjadi tekanan psikologis seseorang sebab kehilangan pekerjaan termasuk dengan penurunan standar kehidupan. Tidak hanya itu pengangguran juga berpengaruh terhadap perekonomian suatu Negara dan akan berdampak negatif karena pengangguran merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan kesejahteraan pembangunan ekonomi. Seseorang yang tidak mempunyai penghasilan yang tetap akan menjadi kaum sosial miskin, dimana kemiskinan menjadi suatu fenomena yang juga merupakan penyakit perekonomian. Dengan tingginya tingkat pengangguran pasti menyebabkan tingkat kejahatan semakin tinggi, hal ini dilakukan oleh para penganggur yang tidak memiliki pekerjaan karena di paksa dengan keadaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu melakukan kejahatan seperti mencuri, menipu dan sebagainya. Oleh karena itu diperlukannya kebijakan pemerintah untuk dapat mengurangi peningkatan jumlah pengangguran yang terjadi (*Edwin Basmar dan Rachmat Sugeng, 2020:38*).

Jawa barat termasuk provinsi yang memiliki jumlah pengangguran yang tinggi di pulau jawa. Permasalahan ini memberikan efek yang berkelanjutan dalam jangka panjang, karena besarnya tingkat pengangguran merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan suatu daerah (*Siti Fatimah dan Tanjung, 2021:466*).

Berikut ini adalah data tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 :



Sumber : Badan Pusat Statistik

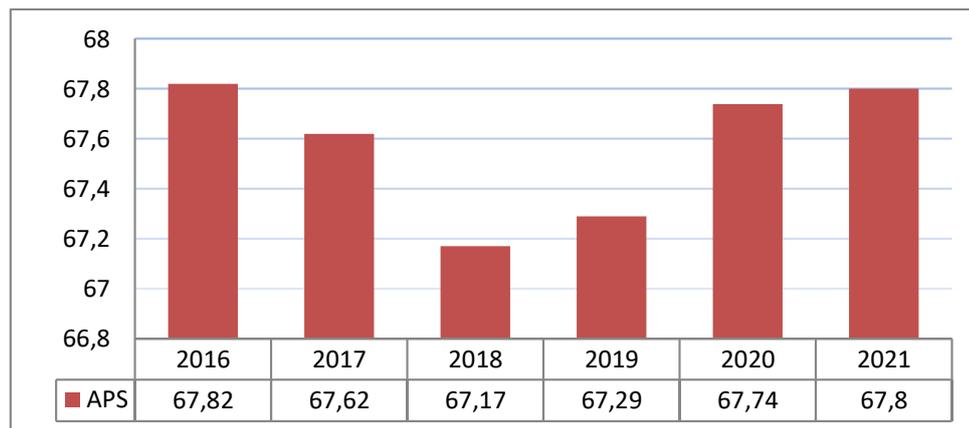
Gambar 1.1 Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2021

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan jumlah Pengangguran Terbuka di Provinsi Jawa Barat mengalami ketidakstabilan dan perubahan naik turun setiap tahun-nya. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang sangat penting untuk melihat seberapa besar persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Dari tahun 2017 sampai 2019 dilihat dari grafik persentase pengangguran mengalami naik turun, tetapi di tahun 2020 persentase pengangguran mulai melonjak tinggi mencapai 10,46% jumlah ini naik 2,42% dari tahun 2019. walaupun ada penurunan angka pengangguran di tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih tergolong tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Naiknya jumlah pengangguran disebabkan berbagai faktor salah satunya di tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan dan jumlah penduduk yang banyak (Emil, 2021).

Pengangguran suatu masalah yang sulit dipecahkan dan suatu yang tidak dikehendaki, penyakit ekonomi ini terus terjadi di beberapa daerah. Pemerintah harus segera bergerak dalam menghadapi pemecahan masalah pengangguran ini karena akan berdampak buruk terhadap perekonomian suatu Negara. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya pengangguran ini menjadi lebih tinggi (khodijah ishak, 2003:22).

Salah satu indikator yang mempengaruhi pengangguran adalah Tingkat Pendidikan, pendidikan merupakan modal yang dapat meningkatkan kemampuan seseorang baik secara formal maupun keterampilan. Kebanyakan perusahaan melihat dari berbagai kriteria tingkat pendidikan yang ditempuh, kriteria yang diberikan perusahaan biasanya minimal pendidikan SMA/SMK, diploma dan sarjana untuk para pencari kerja, maka dari itu betapa pentingnya pendidikan apalagi untuk menciptakan atau mengukur kualitas kemampuan seseorang (Syurifto Prawira, 2018 : 162). Seperti dalam peraturan pemerintah RI No 47 2008 tentang setiap warga Negara Indonesia wajib mengikuti program wajib belajar dan setiap warga Negara Indonesia yang memiliki anak wajib bertanggung jawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anak-nya (Imarotus Suaidah, 2011:1) . Pemerintah telah menetapkan wajib belajar 12 tahun di tahun 2015, karena kualitas pendidikan merupakan hal yang penting dalam pembangunan modal manusia. Pada saat itu juga terjadi polemik karena kebijakan wajib belajar 9 tahun pun belum mencapai 100% keberhasilannya. Berdasarkan data BPS 2019 provinsi di Jawa Barat juga belum memenuhi pencapaian dalam wajib belajar 9 tahun. Apabila di barengi dengan usia produktif tinggi tanpa dibarengi kualitas

SDM yang memadai maka produktivitas tidak akan berjalan optimal, sedangkan di Jawa Barat usia produktif sebanyak 35,96 juta di tahun 2018 (Wardhana et al, 2020:197). Berikut ini merupakan data tingkat pendidikan Provinsi Jawa Barat yang diukur menggunakan angka partisipasi sekolah:



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2 Tingkat Pendidikan Provinsi Jawa Barat 2016-2021

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan perbandingan jumlah penduduk kelompok usia tertentu yang sedang menempuh jenjang pendidikan terhadap penduduk yang usia sekolahnya sesuai yang dinyatakan dalam persentase. Tujuan dari APS ini untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Berdasarkan gambar 1.2 Tingkat Pendidikan yang diukur menggunakan Angka Partisipasi Sekolah (APS), Provinsi Jawa Barat mengalami naik turun setiap tahunnya. Di tahun 2017 angka partisipasi sekolah mengalami penurunan 0,2% menjadi 67,62% dan di tahun 2018 mengalami penurunan juga mencapai 0,45% menjadi 67,17. Di tahun 2019 sampai 2021 angka partisipasi sekolah mengalami kenaikan sebesar 0,63% menjadi 67,80% namun angka kenaikan tersebut masih belum memenuhi target. Deretan pendidikan mengengah di

targetkan sebesar 82,15% namun baru terealisasi 67,82% di tahun 2016 yang merupakan capaian tertinggi namun tetap belum mencapai target karena masih ada selisih sebanyak 14,33% yang harus dicapai.

Beberapa program pemerintah dalam meningkatkan angka partisipasi sekolah melalui Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan prasarana sekolah, dan pemberian beasiswa untuk siswa yang berprestasi dan berbakat. Program bantuan pemerintah tersebut mampu menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan siswa SMP ke sekolah menengah meski belum mencapai target (Kemendikbud:2022).

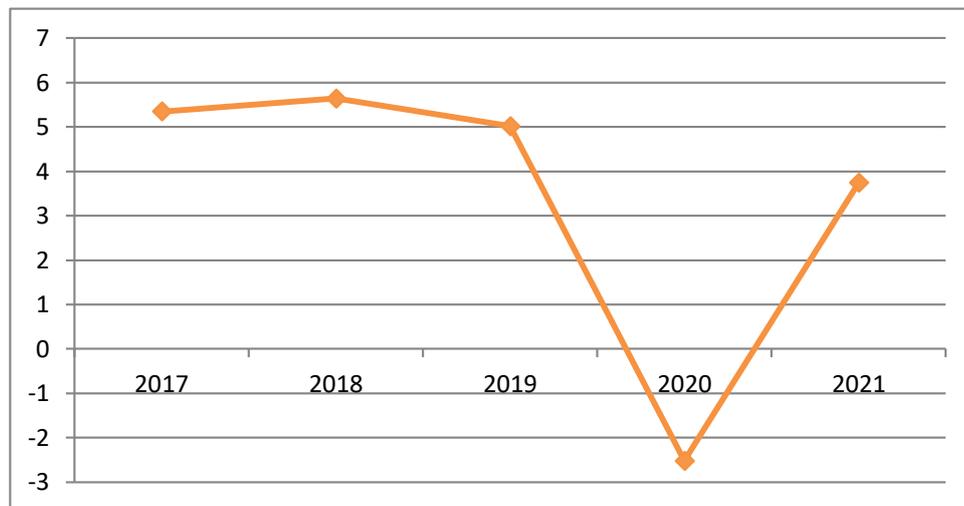
Selanjutnya indikator yang juga dapat mempengaruhi pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Habel dan Putri (2021:55) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Ketika pertumbuhan ekonomi naik maka tingkat pengangguran akan turun.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi pada hakikatnya merupakan usaha dan kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat. Indikator yang bisa menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk menilai seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah laju pertumbuhan ekonomi (Kairupan:2013).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) laju pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun yang memperlihatkan tingkat

keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu, pertumbuhan yang positif adanya kenaikan produksi barang dan jasa.

Berikut ini adalah data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat yang dihitung berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan tahun 2017-2021:



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3 Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021

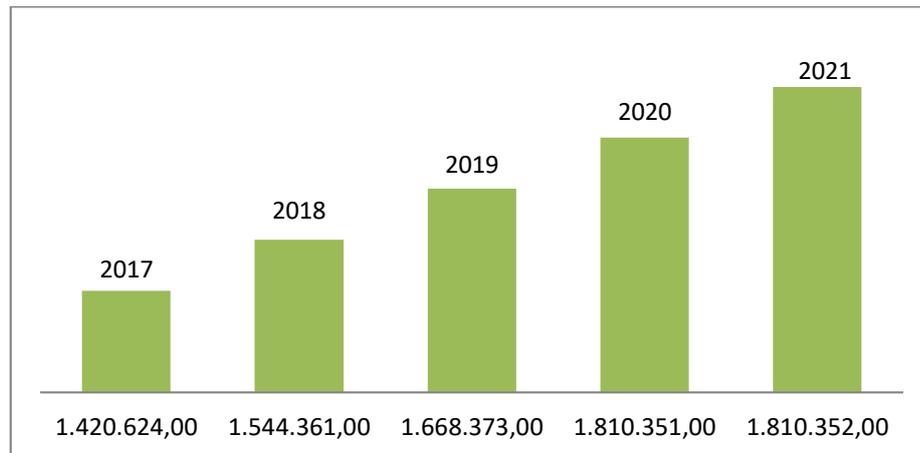
Berdasarkan gambar 1.3 di atas dapat dilihat laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2017-2019, namun di tahun 2020 terkontraksi mencapai -2,52 persen atau menurun dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 5,02 persen. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang menurunkan perekonomian di Jawa Barat bahkan Indonesia. Pada tahun 2021 ekonomi di Jawa Barat kembali tumbuh 3,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami penurunan. Namun, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan

dengan tahun sebelum terjadinya pandemi covid-19 yang tumbuh mencapai 5 persen. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang tujuannya memperluas lapangan kerja serta pemerataan pembagian pendapatan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat (BPS). Dapat dilihat dari gambar 1.1 ketika tingkat pengangguran terbuka di Jawa Barat turun pertumbuhan ekonomi naik, tetapi di tahun 2020 ketika pertumbuhan ekonomi turun mencapai -2,25 tingkat pengangguran naik.

Selanjutnya indikator yang mempengaruhi pengangguran yaitu upah minimum. Upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang ditentukan setiap tahunnya sebagai jaringan pengaman di suatu wilayah. Tujuan penetapan kebijakan upah minimum ini supaya memberikan perlindungan bagi para pekerja/buruh agar mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dari para pengusaha dalam memberikan upah (Kadek Sudiarta:2).

Besarnya nilai upah minimum tiap daerah pasti akan berbeda. Di tingkat provinsi Gubernur dibantu oleh rekomendasi Dewan Pengupahan secara tahunan rutin mengusulkan besaran upah minimum (Keppres RI No.107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, 2004).

Berikut ini merupakan data Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) Jawa Barat Tahun 2017-2021:



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.4 Upah Minimum Regional/Provinsi di Jawa Barat Tahun 2017-2021

Besarnya nilai upah minimum tiap daerah pasti akan berbeda. Di tingkat provinsi Gubernur dibantu oleh rekomendasi dewan pengupahan secara tahun rutin mengusulkan besaran upah minimum (Keppres RI No.107 Tahun 2004 tentang Dewan pengupahan, 2004).

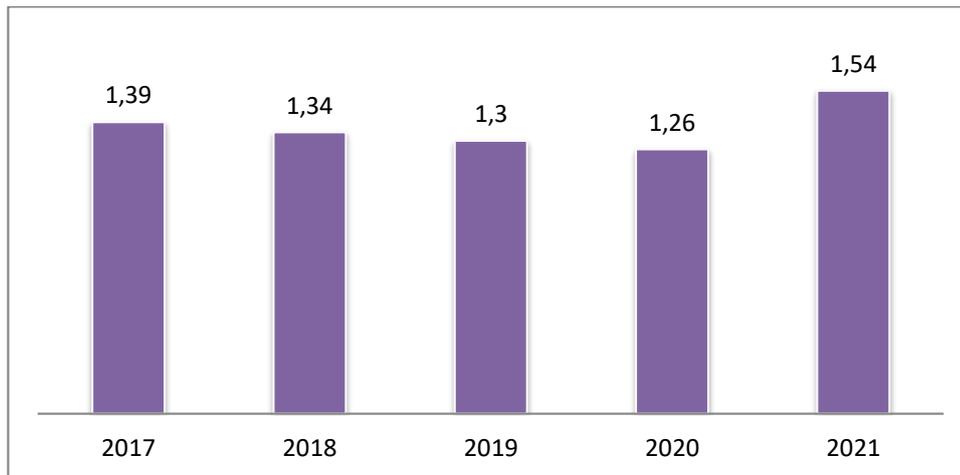
Berdasarkan gambar 1.4 tingkat upah minimum di provinsi jawa barat mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Besarnya UMP jawa barat 2021 ditetapkan Rp. 1.841.487,00. Penetapan tersebut dituangkan dalam keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561 tahun 2021. Peningkatan upah minimum ini tentunya menjadi masalah bagi pemerintah. Adanya kenaikan upah minimum ini memiliki dua sisi yang berbeda dimana kenaikan upah minimum mendorong kenaikan pendapatan pekerja dan kenaikan konsumsi, yang ketika pendapatan meningkat maka kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan semakin besar (joko dan Muhammad, 2021:2). Tetapi disisi lain upah minimum mempengaruhi penawaran dan permintaan tenaga kerja, penawaran tenaga kerja akan semakin meningkat sedangkan permintaan tenaga kerja itu sendiri akan

berkurang. Berkurangnya permintaan tersebut dikarenakan para pengusaha tidak mampu memberikan upah yang tinggi sehingga akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang akan menyebabkan terjadinya pengangguran (Indah, 2021:788)

Indikator selanjutnya yang juga dapat mempengaruhi pengangguran adalah pertumbuhan penduduk. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syahrina dan Abdul (2015:54) menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran yang artinya apabila terjadi pertumbuhan penduduk setiap tahunnya maka jumlah penduduk akan semakin banyak dan pengangguran juga akan meningkat.

Pertambahan penduduk secara berkelanjutan akan menimbulkan dampak buruk terhadap penduduk itu sendiri tidak hanya pengangguran saja tetapi juga kerusakan lingkungan, lahan yang semakin semakin sempit. Pengangguran yang disebabkan pertumbuhan penduduk terjadi karena tidak sebandingnya penyerapan tenaga kerja dengan penduduk yang tumbuh di setiap tahunnya, serta tidak diikutinya pertumbuhan lapangan pekerjaan baru (Rangga, 2019:70). Peningkatan pertumbuhan penduduk memiliki dua sisi yang berbeda, ketika suatu wilayah mengalami pertumbuhan penduduk maka jumlah penduduk akan meningkat dan bisa menjadi modal dalam pencapaian tujuan, tetapi apabila tidak dibarengi dengan lapangan pekerjaan akan menciptakan masalah ketenagakerjaan (Amirul dan Wahyu, 2017:375).

Berikut ini merupakan data pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021:



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1.5 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat 2017-2021

Berdasarkan gambar 1.5 Jawa Barat disetiap tahunnya mengalami pertumbuhan penduduk, yang dimana ketika terjadi pertumbuhan penduduk maka jumlah penduduk akan semakin bertambah. Pertumbuhan penduduk di Jawa Barat dilihat dari grafik di atas mengalami naik turun di setiap tahunnya, pada tahun 2021 pertumbuhan penduduk ini mengalami kenaikan lagi mencapai 1.54% lebih tinggi dari tahun sebelumnya di 2020 yang hanya 1.26%. Menurut data dari BPS jumlah penduduk di Jawa Barat mengalami kenaikan disetiap tahunnya dan juga meskipun pertumbuhan penduduk pada tahun sebelumnya berkurang, provinsi Jawa Barat ini masih menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di tahun 2021 (Data Kependudukan, 2021)

Dengan melihat fenomena pengangguran di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pengangguran di Jawa Barat Tahun 2011-2021”** berdasarkan karakteristik sosial dan ekonomi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pertumbuhan penduduk secara parsial terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2021 ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pertumbuhan penduduk secara simultan atau bersama-sama terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pertumbuhan penduduk secara parsial terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pertumbuhan penduduk secara simultan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi semua pihak adapun kegunaan penelitian yang diharapkan antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pertumbuhan penduduk terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2021, juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan informasi yang relevan mengenai pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan pertumbuhan penduduk terhadap pengangguran di Jawa Barat. Dan diharapkan dapat digunakan pemerintah ataupun instansi terkait untuk mempertimbangkan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi dalam rangka mengurangi pengangguran di Jawa Barat.

b. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pengaruh tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pertumbuhan penduduk terhadap pengangguran.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh tingkat pendidikan,

